

**PENGARUH AUDIT INTERNAL TERHADAP PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Oleh : YUSRIWARTI

*Dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
Email: yusriwati9@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah audit internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini dilakukan pada 6 cabang bank konvensional yang ada di Tembilahan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kausal komparatif, dengan jumlah sampel 36 namun yang diolah hanya 30 ini disebabkan hanya 32 yang kembali dan 2 dinyatakan jatuh dikarenakan kuesioner tidak diisi secara lengkap. Jenis data yang dipakai adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada responden dan mengambalnya kembali paling lama dalam jangka waktu 2 minggu.

Model analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, dengan pengujian kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas data dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Uji-t dan koefisien determinasi (R^2). Deskriptif statistik juga digunakan untuk membantu menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul.

Hasil penelitian ini menunjukkan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap GCG. Nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,345 yang berarti bahwa variasi atau perubahan variabel dependen (GCG) hanya mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen (audit internal) sebesar 34,5% sedangkan sisanya sebesar 65,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Kata kunci: Audit Internal, *Good Corporate Governance* (GCG)

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman tidak hanya membawa dampak yang positif bagi dunia bisnis tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu perkembangan zaman menimbulkan masalah yang kompleks bagi setiap perusahaan, dimana perusahaan harus melakukan pengelolaan perusahaan dan pengawasan harta bendanya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan untuk melakukan pemborosan, memperkaya diri sendiri, kecurangan (*fraud*). Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang dengan baik dibutuhkan upaya penyelamatan dan penyempurnaan di setiap bidang yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Korupsi atau kecurangan di Indonesia telah menjadi kebudayaan yang sulit dihilangkan, ini terlihat dari kenyataan bahwa korupsi telah terjadi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Mulai dari pejabat Negara sampai pada pejabat swasta.

Berikut ini adalah tabel indeks persepsi korupsi Negara Indonesia.

Tabel 1
Negara Terkorup di Dunia pada tahun 2010

No.	Negara
1.	Azerbaijan
2.	Bangladesh
3.	Bolivia
4.	Kamerun
5.	Indonesia
6.	Irak
7.	Kenya
8.	Nigeria
9.	Pakistan
10.	Rusia.

Sumber: Political and Economic Risk Consultancy

Tabel 2
Negara Terkorup di Asia-Pasifik pada tahun 2010

No.	Negara
1.	Indonesia
2.	Kamboja
3.	Vietnam
4.	Filipina
5.	India

Sumber: Political and Economic Risk Consultancy

Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi di mana-mana, diberbagai tingkatan golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melanda kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya berfungsi untuk memberantas korupsi.

Secara teoritis peraturan yang berlaku di Indonesia, dunia perbankan memiliki peraturan yang mengatur para nasabah dan manajemen perbankan, salah satu peraturan tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang standar Sistem Pengendalian Intern yang harus diterapkan oleh Perbankan yang termuat dalam Lamp. SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003. Selain itu terdapat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) Nomor 23 tahun 1960 tentang rahasia bank.

Apabila terjadi masalah-masalah internal seperti penyimpangan, pemborosan serta kecurangan ini merupakan tanda bahwa fungsi dari lembaga tidak dilaksanakan dengan taat dan konsisten. Dengan demikian, tata kelola perusahaan tidak dilaksanakan secara sehat. Untuk mengatasi masalah ini adalah dengan cara memberdayakan fungsi pengawasan yang bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan. Dengan berfungsinya fungsi pengawasan maka akan mendorong terlaksananya pengendalian risiko manajemen, sistem pengendalian dan penataan manajemen untuk kesinambungan sebuah perusahaan.

Audit internal dapat didefinisikan sebagai aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Pelaksanaan audit internal diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-496/BL/2008, tentang pembentukan dan pedoman dalam pembuatan piagam unit audit internal. Dalam proses mencegah *fraud* yang terjadi di perbankan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi bank umum.

Secara teoritis, praktek GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. *Corporate governance* akhir-akhir ini menjadi perhatian publik, terutama karena sumbangannya yang jelas terhadap kesehatan perusahaan dan masyarakat secara umum. *Corporate governance* merupakan sistem dimana pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan. Dalam penerapan *good corporate governance* terdapat lima prinsip yang harus diterapkan, prinsip tersebut yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

Penerapan GCG diatur dalam Pedoman Penerapan *Good Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Komite nasional bagi Pengelolaan Perusahaan dibentuk sebagai lembaga nonpemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor: Kep. 10/M.UKUI/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999 dengan tugas merumuskan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai Pengelolaan Perusahaan. Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum Indonesia. Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Ada banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* salah satunya adalah yang dilakukan oleh Gita Gumilang (2009) dimana penelitian yang dilakukan oleh Gita Gumilang merupakan penelitian studi kasus yang dilakukan pada sebuah perusahaan perkebunan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa audit internal berpengaruh terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2008) yang berjudul

pengaruh peranan komite audit dan *internal control* terhadap penerapan *good corporate governance* (studi pada BUMN terbuka di Indonesia), penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi merupakan studi pada BUMN yang terdiri dari beberapa jenis perusahaan mulai perbankan, manufaktur dan jasa. Hasil penelitian ini adalah komite audit dan *internal control* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*, artinya perusahaan dengan komite audit dan *internal control* yang berperan dengan baik akan dapat meningkatkan pelaksanaan *good corporate governance*.

II. KERANGKA KONSEPTUAL DAN MODEL HIPOTESIS

Berdasarkan lingkungannya audit terbagi atas tiga, yaitu: audit internal, audit eksternal, dan audit pemerintahan. Dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada audit internal. Sebab penelitian ini ingin membuktikan apakah ada pengaruh peranan audit internal terhadap penerapan *good corporate governance*.

IPPF (2009) mendefinisikan **Audit Internal** adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola.

Ikatan auditor internal (*institute of internal auditors* – IIA) dikutip oleh Gumilang (2009) mendefinisikan audit intern adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit intern ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas, manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Auditor intern adalah auditor yang bekerja pada suatu perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada perusahaan tersebut (Yusup, 2001). Tugas audit yang dilakukannya terutama ditujukan untuk membantu manajemen perusahaan tempat dimana ia bekerja. Jumlah staf auditor intern setiap perusahaan berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya skala perusahaan tersebut. Auditor intern pada umumnya memiliki kewajiban memberikan laporan langsung kepada pimpinan perusahaan.

Selain jumlahnya yang beragam tanggungjawab auditor intern setiap perusahaan juga beragam tergantung pada kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Auditor intern berkewajiban memberikan informasi kepada manajemen yang berguna untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efektivitas perusahaan.

2.1 Fungsi Audit Internal

Audit internal terlibat dalam memenuhi kebutuhan manajemen, dan staf audit yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan organisasi di atas rencana dan aktivitas mereka. Tujuan-tujuan audit disesuaikan dengan tujuan manajemen, sehingga auditor internal itu sendiri berada dalam posisi untuk menghasilkan nilai tertinggi pada hal-hal yang dianggap manajemen paling penting bagi kesuksesan organisasi.

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001;322.2) mengatakan fungsi audit internal adalah memantau kinerja pengendalian entitas. Pada waktu auditor berusaha memahami pengendalian internal, auditor harus berusaha memahami fungsi audit intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang relevan dengan pernyataan audit.

Peran auditor antara lain melakukan audit keuangan, audit kepatuhan dan audit operasional. Peran SPI (satuan pengawasan internal) dalam mewujudkan GCG dikutip dari Piagam Satuan Pengawasan Internal (SPI) yaitu:

1. Sebagai pengawas independen yang melakukan audit, evaluasi dan menilai operasional dan aktivitas perusahaan,
2. Sebagai katalisator dan konsultan dalam hal-hal tertentu bagi Direksi dan manajemen yang berkaitan dengan praktik manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan praktik GCG serta dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara berkelanjutan.

2.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA) IIA, tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Staf dari audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kegiatan yang ditelaah. Institute of Internal Auditors (IIA) mengakui bahwa tujuan audit internal meliputi juga meningkatkan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1 September-Desember 2010

Ruang lingkup dari audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan beban.

2.3 Kode Etik Audit Internal

Bagi profesi audit internal, kode etik merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas profesional terutama yang menyangkut manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola. Dalam kode etik IIA, terdapat dua komponen penting, yaitu:

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal.
 2. *Rule of conduct* yang mengatur norma perilaku yang diharapkan dari Auditor internal.
- Auditor internal harus menjaga prinsip-prinsip kode etik sebagai berikut:
- a. Integritas, integritas dari Auditor internal menimbulkan kepercayaan dan memberikan basis untuk mempercayai keputusannya.
 - b. Objektif, Auditor internal membuat penilaian yang berimbang atas hal-hal yang relevan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam pengambilan keputusan.
 - c. *Confidential*, Auditor internal harus menghargai nilai-nilai dan kepemilikan atas informasi yang mereka terima dan tidak menyebarkan tanpa izin kecuali ada kewajiban profesional.
 - d. Kompetensi, auditor internal menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan jasa audit internal.

Penekanan Auditor internal dengan kode etik IIA sebagai berikut:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau pihak lain yang dilayani. Namun demikian, Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.

Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi No.3 Tahun ke-1 September-Desember 2010

2.4 Good Corporate Governance

Good corporate governance dapat diartikan secara sederhana pengelolaan perusahaan yang baik. *Corporate governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan/ memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *corporate governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholders*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*) namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Konsep *good corporate governance* (GCG) adalah konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, karena melalui konsep yang menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. (sumber: Warta Warga Student Journalism Gunadarma University)

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu proses dan terstruktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna meningkatkan nilai tambah para pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan Peraturan Perundangan dan nilai-nilai etika.

Menurut Agoes dalam Ratnaningsih (2005), *corporate governance* yang baik diakui membantu perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembali (*rate of return*) yang normal. Penerapan *corporate governance* yang baik akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Perbaikan dalam komunikasi
- b. Minimalisasi proses benturan
- c. Fokus pada strategi-strategi utama
- d. Peningkatan produktivitas dan efisiensi

- e. Kestinambungan manfaat
- f. Promosi citra korporat
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan
- h. Perolehan kepercayaan dari investor

Definisi *good corporate governance* dalam peraturan bank Indonesia Nomor: 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan, dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

2.5 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Sutedi (2011) Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kestinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Transparency (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Responsibility (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kestinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. *Independency* (kemandirian)

Independency (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Penerapan *good corporate governance* di Indonesia diatur dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*. Pedoman ini mengatur tentang bagaimana GCG harus diterapkan serta ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG. Selain itu terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu: Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003. *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum* Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.

8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang “Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum”, yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thomas S.Kaihutu (2006) menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap arti penting dan strategisnya penerapan prinsip-prinsip GCG oleh pelaku bisnis di Indonesia. Selain itu, budaya organisasi turut mempengaruhi penerapan GCG di Indonesia.

2.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Ruang lingkup audit internal dewasa ini bukan hanya menyangkut kebenaran dan kewajaran perhitungan secara matematis, akan tetapi meliputi semua aspek organisasi perusahaan. Tujuan audit internal adalah untuk membantu semua anggota manajemen dalam tugas mereka dengan member saran-saran dan komentar-komentas analisis dan penelitian kegiatan yang diperiksanya.

Pentingnya profesionalisme audit internal dalam pelaksanaan *good corporate governance* diungkapkan oleh Leung *et al.*, (2002) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan peran audit internal dalam *corporate governance* dan untuk menjaga kepercayaan *stakeholder* maka audit internal harus bekerja dengan kemampuan profesional yang baik, yang memiliki pengetahuan dan kecakapan. Selanjutnya Ruud (2003) juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan tata kelola yang efektif, fungsi audit internal membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan

Good corporate governance merupakan suatu proses tata kelola perusahaan yang sanga baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan tetap menselaraskan setiap yang berkepentingan pada perusahaan. Dalam penerapan GCG terdapat lima prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu: *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness.*

Sutedi (2011) *Good corporate governance* didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*-nya. Dua hal yang menjadi perhatian dalam konsep ini adalah: *Pertama*, kepentingan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang handal, *Kedua*, kewajiban perusahaan melakukan pengungkapan (*disclousure*).

Menurut Pratolo (2007) dalam penelitiannya yang berjudul *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya pada Jenis Perusahaanyang* menghasilkan temuan bahwa audit manajemen dan pengendalian intern secara simultan berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Gita Gumilang (2009) *Pengaruh Audit Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance* yang dilakukan di PTPN III (PERSERO) Medan yang menghasilkan kesimpulan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap penerapan *good corporate governance*.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat diagram kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai mana yang terlihat dalam gambar 1

Gambar 1
Kerangka Konseptual



2.7 Hipotesis Penelitian

Ho: Audit internal tidak berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*.

Ha: Audit internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*

III. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dan merupakan bank konvensional di Kabupaten Indragiri Hilir yang berjumlah 6 perusahaan.

Metode penyampelan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode nonprobabilitas dengan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*).Metode ini merupakan pemilihan sampel

secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria berikut:

1. Perusahaan yang melakukan audit internal atau memiliki departemen audit internal (departemen pengawasan)
2. Perusahaan yang menerapkan prinsip *good corporate governance*
3. Perusahaan yang bergerak dibidang perbankan
4. Perusahaan yang terdapat di Tembilahan

Responden pada penelitian ini dipilih berdasarkan tingkat manajemen yaitu level manajemen menengah keatas dan karyawan yang merasakan manfaat audit internal secara langsung. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 orang merupakan karyawan bank yang ada di Tembilahan terdiri dari satu orang pimpinan cabang, empat orang kepala bagian dan satu orang staf audit internal pada setiap bank dengan jumlah perusahaan sebanyak 6 perusahaan.

3.2 Variabel Penelitian

3.2.1 Variabel independen

Pada penelitian ini sebagai variabel independen adalah audit internal sedangkan sebagai variabel dependen adalah *good corporate governance*.

- Audit internal/ (X)

Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif semua sumber untuk mencapai tujuan.

Dalam penelitian ini audit internal diukur dengan menggunakan kuesioner audit internal. Kuesioner ini menggunakan *skala likert* yang sesuai dengan sikap dan tindakan yang dilakukan atas pertanyaan yang diajukan. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai dengan 5.

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

3.2.2 Variabel dependen

- *Good corporate governance*/ (Y)

Good corporate governance dapat diartikan secara sederhana pengelolaan perusahaan yang baik. *Corporate governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan/memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Dalam penelitian ini *good corporate governance* diukur dengan menggunakan kuesioner *good corporate governance*.

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur penerapan *good corporate governance* dikelompokkan berdasarkan prinsip *good corporate governance*. Berikut ini adalah pengelompokkannya:

1. Pernyataan 1-6 mencakup prinsip transparansi
2. Pernyataan 7-11 mencakup prinsip kemandirian
3. Pernyataan 12-16 mencakup prinsip akuntabilitas
4. Pernyataan 17-21 mencakup prinsip pertanggungjawaban
5. Pernyataan 22-26 mencakup elemen kewajaran

Variabel ini diukur dengan menggunakan *skala likert* dengan skala 1 sampai dengan 5.

1. Sangat tidak setuju
2. Tidak setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat setuju

3.2.3 Data Penelitian

Data penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan dengan metode kuesioner. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini merupakan kuesioner yang digunakan oleh Gumilang (2009) yang telah melewati uji validitas dan uji reabilitas. Kuesioner dikirimkan secara langsung kepada masing-masing pimpinan perbankan, manajer tiap departemen yang menjadi objek penelitian serta beberapa staf yang merasakan manfaat audit internal seperti teller yang ada di Tembilahan dengan harapan agar peneliti mendapatkan data semaksimal mungkin.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Validitas Kuesioner Penelitian

Pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui keadaan dari suatu data. Untuk menguji validitas adalah dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n , dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini sampel berjumlah 30. Sehingga dalam penelitian ini besarnya df dapat dihitung sebesar $df=30$ maka diperoleh r tabel sebesar 0,361 ($\alpha=5\%$). Nilai ini diperoleh dari tabel II, nilai-nilai *product moment*.

Tabel 3
Validitas Audit Internal

Pertanyaan	<i>Corrected Item Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,412	0,361	Valid
Pertanyaan 2	0,588	0,361	Valid
Pertanyaan 3	-0,132	0,361	Tidak Valid
Pertanyaan 4	0,475	0,361	Valid
Pertanyaan 5	0,518	0,361	Valid
Pertanyaan 6	0,588	0,361	Valid
Pertanyaan 7	0,784	0,361	Valid
Pertanyaan 8	0,676	0,361	Valid
Pertanyaan 9	0,757	0,361	Valid
Pertanyaan 10	0,721	0,361	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2012

Apabila ada instrumen kuesioner yang dinyatakan tidak valid pada saat uji validitas maka instrumen kuesioner tersebut harus dikeluarkan/ dibuang dari daftar instrumen kuesioner. Oleh karena itu pertanyaan 3 dibuang dan tidak dimasukkan kedalam pengujian selanjutnya.

Tabel 4
Validitas GCG

Pertanyaan	<i>Corrected Item Total Correlation</i> (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,549	0,361	Valid
Pertanyaan 2	0,690	0,361	Valid
Pertanyaan 3	0,251	0,361	Tidak Valid
Pertanyaan 4	0,478	0,361	Valid
Pertanyaan 5	0,687	0,361	Valid
Pertanyaan 6	0,644	0,361	Valid
Pertanyaan 7	0,653	0,361	Valid
Pertanyaan 8	0,283	0,361	Tidak Valid
Pertanyaan 9	-0,041	0,361	Tidak Valid
Pertanyaan 10	0,836	0,361	Valid
Pertanyaan 11	0,498	0,361	Valid
Pertanyaan 12	0,535	0,361	Valid
Pertanyaan 13	-0,208	0,361	Tidak Valid
Pertanyaan 14	0,770	0,361	Valid
Pertanyaan 15	0,848	0,361	Valid
Pertanyaan 16	0,770	0,361	Valid
Pertanyaan 17	0,257	0,361	Tidak Valid
Pertanyaan 18	0,693	0,361	Valid
Pertanyaan 19	0,583	0,361	Valid
Pertanyaan 20	0,766	0,361	Valid
Pertanyaan 21	0,837	0,361	Valid
Pertanyaan 22	0,435	0,361	Valid
Pertanyaan 23	0,353	0,361	Tidak Valid
Pertanyaan 24	0,610	0,361	Valid
Pertanyaan 25	0,579	0,361	Valid
Pertanyaan 26	0,828	0,361	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2012

Dengan demikian instrumen yang dinyatakan tidak valid tersebut dikeluarkan dari daftar instrumen kuesioner dan tidak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

4.2 Pengujian Reliabilitas Kuesioner Penelitian

Tabel 5
Reabilitas Audit Internal

Cronbach's Alpha	N of Items
,841	9

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2012

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai *cronbach alpha* audit internal sebesar 0,841. Hal ini berarti bahwa nilai ini telah melewati syarat reliabilitas sebesar 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa audit internal teruji reliabilitasnya.

Tabel 6
Reabilitas GCG

Cronbach's Alpha	N of Items
,946	20

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2012

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai *cronbach alpha* GCG sebesar 0,946. Hal ini berarti bahwa nilai ini telah melewati syarat reliabilitas sebesar 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa audit internal teruji reliabilitasnya.

4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana dilakukan dengan metode *enter*. Dengan metode ini seluruh variabel akan dimasukkan dalam analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	53,066	8,878		5,977	,000
Audit_Internal	1,001	,261	,588	3,842	,001

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2012

Hasil pengujian menggunakan *software* SPSS pada persamaan tersebut dipaparkan sebagai berikut

$$Y = 53,066 + 0,588X +$$

Berdasarkan hasil pengujian pada table 7 pada persamaan tersebut sebagai X adalah Audit Internal dan Y adalah GCG. Konstanta sebesar 53,066 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel Audit Internal(X), maka nilai GCG (Y) adalah 53,066. Sedangkan koefisien regresi sederhana sebesar 0,588 menyatakan bahwa setiap pemanbahan satu skor audit internal maka nilai GCG akan meningkat atau mengalami kenaikan sebesar 0,588.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji- t

Uji statistik t dilakukan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji- t dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen Audit Internal berpengaruh terhadap variabel dependen GCG.

Uji-t dilihat dari signifikansi, jika nilai signifikansi dibawah 5% (< 0,05), maka masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari hasil uji-t yang ditunjukkan pada tabel 7 di atas menunjukkan nilai probabilitas signifikansi 0.001 lebih kecil dari 5% atau 0,001<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya koefisien regresi signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan Audit Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap GCG.

4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Melalui Koefisien Determinasi (R^2) dapat diketahui sejauh mana variabel peranan audit internal mampu menjelaskan variabel penerapan GCG.

Tabel 8
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,588	,345	,322	5,851

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS, 2012

Pada tabel 8 di atas, terlihat nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,345 yang berarti bahwa variasi atau perubahan variabel dependen (GCG) hanya mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen (audit internal) sebesar 34,5% sedangkan 65,5% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil penelitian yang menerima semua rumusan hipotesis. Artinya, hasil penelitian ini menunjukkan audit internal memiliki pengaruh positif terhadap GCG. Hal ini sesuai dengan keberadaan fungsi SPI menjamin efektivitas pengendalian internal

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan pengujian hipotesis pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini mampu dibuktikan secara parsial, bahwa audit internal berpengaruh secara positif terhadap *good corporate governance* (GCG). Nilai R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 0,345 yang berarti bahwa variasi atau perubahan variabel dependen (GCG) hanya mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan variabel independen (audit internal) sebesar 34,5% sedangkan 65,5% dipengaruhi oleh variabel lain tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan status perusahaan yang mempengaruhi aktivitas internal kontrol dan audit internal terhadap penerapan GCG. Status perusahaan tersebut adalah BUMN, swasta dan perusahaan daerah. Untuk BUMN aktivitas internal kontrol dan audit internal dan penerapan GCG diatur berdasarkan peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Sedangkan perusahaan yang berstatus swasta dan perusahaan daerah berpedoman kepada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Secara keseluruhan perusahaan yang berstatus BUMN memiliki internal control yang lebih baik dan penerapan GCG yang lebih maksimal.

5.2 Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan audit internal berpengaruh positif terhadap GCG. Audit internal akan membantu dalam mengefektifkan pengendalian internal perusahaan sehingga perusahaan harus tetap mempertahankan keberadaan SPI (satuan pengawas internal). Selain itu, pihak manajemen perusahaan beserta dewan komisaris harus memberikan dukungan penuh terhadap SPI (satuan pengawas internal) agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Penelitian ini dilakukan pada kantor cabang perusahaan yang bergerak dibidang perbankan. Untuk pengujian yang lebih mendalam dan mendapatkan hasil yang lebih signifikan, penelitian berikut hendaknya dilakukan pada perusahaan induk dan yang menjadi responden hanya staf SPI saja.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik* Jilid 1 Edisi 3. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.

- Andriyanto, Risyad. *Penerapan Good Corporate Governance pada Lembaga Keuangan Syariah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit-Undip.
- Gumilang, Gita. 2009. *Pengaruh Peranan Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance PT. Perkebunan Nusantara III (persero) Medan*. Skripsi Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Gusnardi. 2008. *Pengaruh Peranan Komite Audit dan Internal Control terhadap Penerapan Good Corporate Governance (studi pada BUMN terbuka di Indonesia)*. *Sosiohumaniora*, Vol.10, No. 2 hal 58-72.
- Indrianto, Nur Dr M.Sc dan Drs. Bambang Supomo M.Si. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Indriyani, Henny & Muhammadinah. 2010. *Pengaruh Kualitas Audit Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada PT. Pertamina*.
- Jusup, Al. Haryono. 2001. *Auditing (pengauditan)*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Karni, Soejono. 2000. *Auditing: Audit Khusus dan Audit Forensic Dalam Praktik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Ekonomi Universitas Indonesia.
- Leung, Philomena, Barry J. Cooper, dan Peter Robertson, 2002. *The rule of internal Audit In Corporate Governance dan Management, The Institute of Internal auditor*
- Mulyadi. 2002. *Auditing* Buku 1 Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Pratolo, Surya. 2007. *GCG dan kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar*, 26-28 juli 2007.
- Ratnaningsih, Rini. 2005. *Evaluasi Atas Efektivitas Internal Audit Dalam Rangka Penerapan GCG (Studi Kasus: Bpr Harta Tanamas)*. Tesis Akuntansi Universitas Indonesia.
- Ruud, T Flemming, 2003 *The Internal Audit Function; on Integral part of Organizational Governance*.
- Siregar, Syofian. 2010. *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- S.Kahaitu, Thomas. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No.1 hal 1-9.
- Sulistiwati WP, Lisa. 2006. *Peranan Internal Audit dalam Penerapan GCG pada PT BEI (persero)*. Tesis Akuntansi Universitas Indonesia.
- Sulistyo, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS 17*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widodo, Bambang. 2009. *Peran SPI dalam Mendukung Penerapan Good Corporate Governance di PT Indofarma Tbk*. Makalah Yayasan Pendidikan Internal Audit.
- Wulan, Mulyaning. 2010. *Peran Divisi Audit Internal Dalam Penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus Pada PT. Syariah Takaful Indonesia)*. Tesis Akuntansi Universitas Indonesia.
- Ariyadi, Franky. *Konsep Kebijakan Anti Fraud Di Perbankan*. Sumber: <http://www.wartaekonomi.co.id/berita-192824678-konsep-kebijakan-anti-fraud-di-perbankan.htm>
- Azhar. *Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- IPPF. 2009. Sumber: <http://auditorinternal.com/2010/01/18/definisi-audit-internal-pada-ippf-2009/>
- Setianingrum, Any Mesy Ir. 2011. Sumber: <http://shariaeconomicforum.wordpress.com/2011/11/29/citibank-vsprinsip-ekonomi-syariah/>
- Nasution, Manahan. 2003. *Sekilas Tentang Internal Auditor*. By USU Digital Library.
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-496/BL/2008
- Keputusan Menteri BUMN Nomor 117. 2002. *Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN*. Indonesia
- Lamp.SE No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003. *Pedoman Standar Pengendalian Intern Bank bagi Umum*. Pedoman Umum *Good Corporate Governance*. 2009. Komite Nasional kebijakan Governance.
- Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003. *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*. Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006. *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*. Indonesia.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 *Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara*.

PERPU No. 23 tahun 1990 Tentang Kerahasiaan Bank

PT (persero) Pengerukan Indonesia. Piagam Satuan Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*).

PT Petrokimia. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum

Fungsi Intermediasi Perbankan Belum Optimal Pengawasan Bank Masih Lemah, sumber: <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/79752>

Koran Warta Warga Student Journalism Gunadarma University

<http://boyendratamin.blogspot.com/2011/12/indek-persepsi-korupsi-corruption.html>

<http://serba-sepuluh.blogspot.com/2010/04/daftar-10-negara-terkorup-di-dunia.html>